

**TRADISI UANG JEMPUTAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT  
ADAT PADANG PARIAMAN PERANTAUAN DI BANDAR LAMPUNG  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas –tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum  
Al-Ahwal Al-Syaksiyah**

**Oleh**

**Teresa**

**NPM 1721010067**

**Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

**TRADISI UANG JEMPUTAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT  
ADAT PADANG PARIAMAN PERANTAUAN DI BANDAR LAMPUNG  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar dalam Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum  
Al-Ahwal Al-Syaksiyah**

**Oleh**

**Teresa**

**NPM 1721010067**

**Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)**

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A**

**Pembimbing II : Dr. H. Jayusman M.Ag**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1442 H/2021M**

## ABSTRAK

Tradisi Uang Jemputan atau *Bajapuik* merupakan tradisi yang telah menjadi ciri khas masyarakat adat Padang Pariaman, tradisi bajapuik termasuk dalam *adat nan diadatkan*, karena hanya terjadi di daerah tertentu saja, dimana tradisi ini masih dilaksanakan oleh masyarakat adat Padang Pariaman yang berada di perantaun Bandar Lampung. Dalam pandangan masyarakat lain tradisi ini nampaknya memberatkan pihak mempelai wanita dan juga berbeda dengan apa yang disyariatkan dalam Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik tradisi uang jemputan dalam perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman perantauan di Bandar Lampung ? bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik tradisi uang jemputan dalam perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman perantauan di Bandar Lampung ?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik tradisi uang jemputan dalam perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman perantauan di Bandar Lampung, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi praktik uang jemputan dalam perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman perantauan di Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, penelitian ini bersifat *dekriptif analisis* yaitu cara menganalisis data yang teliti dengan memaparkan data-data, menggambar, menafsirkan, menunjukan suatu fenomena yang berkembang di masyarakat tersebut. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka penelitian menemukan fakta yang terjadi bahwasannya praktik uang jemputan di rantau Bandar Lampung masih dilaksanakan oleh masyarakat adat Padang Pariaman walaupun ada yang tidak melaksanakannya lagi karena sudah di rantau dan tidak ada konsekuensi apabila tidak melaksanakannya, adat ini dilaksanakan untuk menghormati sesama perantauan. Tradisi uang jemputan tetap dilaksanakan meskipun tidak seratus persen seperti di Padang Pariaman. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik uang jemputan masih ada yang melaksanakan di perantauan Bandar Lampung namun, uang jemputan di rantau mengalami penyederhanaan pelaksanaannya tergantung kesepakatan kedua belah pihak *ninik mamak* dan keluarga besar. Apabila perkawinan terjadi antara pria Pariaman dengan wanita bukan dari Pariaman maka dikembalikan lagi kepada kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum Islam uang jemputan ini bukanlah hal yang dilarang, uang jemputan termasuk ke dalam prosesi di dalam *khitbah*. Hukum Islam menyerahkan kepada *urf* (kebiasaan), tradisi uang jemputan ini telah memenuhi syarat-syarat *urf* shahih. Pada hakikanya uang jemputan tidak bertentangan dengan syariat, meskipun terkesan memberatkan namun uang jemputan masih tetap dilaksanakan karena sebenarnya pada uang jemputan tidak ada pihak yang dirugikan karena uang jemputan yang diberikan pihak perempuan kepada pihak laki-laki tersebut akan kembali kepada mempelai wanita pada saat *manjalang* dan uang kembali yang diberikan pihak laki-laki bahkan lebih besar, uang jemputan merupakan tanda saling menghormati antara keluarga mempelai pria dan mempelai wanita.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teresa  
NPM : 1721010067  
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tradisi Uang Jemputan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Padang Pariaman Perantauan di Bandar Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,

Penulis

Teresa

1721010067





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 UIN Raden Intan Lampung*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tradisi Uang Jemputan Dalam Perkawinan  
Masyarakat Adat Padang Pariaman  
Perantauan di Bandar Lampung Dalam  
Perspektif Hukum Islam**

**Nama : Teresa**

**NPM : 1721010067**

**Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal-  
Syakhshiyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. Maimun, S.H., MA**

**NIP. 197005022000032001**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Jayusman M.Ag**

**NIP. 197411062000031002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Ahwal-Syakhsiyah**

**H. Rohmat S. Ag., M. H. I**

**NIP. 197409202003121003**





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 UIN Raden Intan Lampung*

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “Tradisi Uang Jemputan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Padang Pariaman Perantauan di Bandar Lampung Dalam Prespektif Hukum Islam” disusun oleh Teresa NPM : 1721010067 Prodi *Ahwal Syakhshiyah* (Hukum Keluarga) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .**


**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yupi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si** 

**Sekretaris : Dr. Ahmad Fauzan, M.H** 

**Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H, M.H** 

**Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A.** 

**Penguji III : Dr. H Jayusman, M.Ag** 



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M. H.**  
**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي, فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّ بِهِ, ثُمَّ طَأَ طَأَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, رَأْسَهُ, فَلَمَّارَاتِ الْمَرْأَةُ  
أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْعًا جَلَسَتْ, فَقَامَ رَجُلٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)<sup>1</sup>

“Rasulullah shallallahu alaihi wasalam seraya berkata: “Wahai Rasulullah, aku datang untuk memberikan (menghibahkan) diriku kepadamu.” Lalu Rasulullah saw melihat kepadanya. Beliau melihat kepadanya ke atas dan ke bawah berulang kali, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Maka tatkala perempuan itu melihat bahwasanya beliau tidak memutuskan sesuatu tentang dirinya, ia pun duduk”

---

<sup>1</sup>Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Kitab Bulughul Maram Min Ahyati Ahkam* (Indonsia : Pustaka Islam), h. 210

## **PERSEMBAHAN**

Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kukasihi, kucintai, dan tentu saja sangat berjasa dan berharga dalam kehidupanku:

1. Kepada kedua orang tuaku yang kusayangi dan kucintai Ayahanda Awaluddin dan Ibunda Daya Masah. Yang tak pernah lelah dalam membimbing, menyangi, mendukung, mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kakak tercinta saya Ilham Awaldiansah yang selalu mendukung, mendo'akan memberikan fasilitas yang dibutuhkan penulis. Kepada bang Thofan yang selalu membantu dalam proses penulisan, mendukung dan mendo'akan.
3. Almamaterku yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Univeristas Islam Negeri Raden Intan Lampung



## **RIWAYAT HIDUP**

Teresa di lahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 Desember 1996, putri kedua dari dua bersaudara. Pasangan dari Bapak Awaluddin dan Ibu Daya Masah.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Labuhan Dalam Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2009, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 19 Bandar Lampung dan selesai pada 2012, kemudian melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) SMTI Bandar Lampung jurusan Kimia Analisis.

Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi *Ahwalus Syakhsiyah* (Hukum Keluarga).

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Desember 2020

Teresa

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya serta keberkahan, kesehatan, kasih sayang dan karuninya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tradisi Uang Jemputan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Padang Pariaman Perantauan di Bandar Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam” . Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman peradaban ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) di fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Hukum dan Syari’ah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini sesuai dengan waktu yang tersedia tak lupa sebagai ucapan rasa hormat yang mendalam, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mukri, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Khairuddin Tahmid, M.H selaku dekan fakultas Syariah UIN Raden Intan, berikut wakil dekan I,II,III Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak H.Rohmat S.Ag.,M.H.I selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H.,MA selaku pembimbing Akademik 1 yang membantu dalam perumusan judul skripsi ini dan membimbing hingga skripsi ini dapat diselsaikan.

5. Bapak Dr.H. Jayusman selaku pembimbing 2 yang selalu membimbing dengan sabar, mendukung dan memotivasi, memberikan saran, memberikan petunjuk dan selalu bersedia meluangkan untuk bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini
6. Kepada Tokoh adat PKDP yang telah membantu memberikan informasi, waktu dan kesempatannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap *civitas* akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
8. Kepala perpustakaan Pusat dan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensinya.
9. Kepada bundo kandung PKDP Provinsi Lampung, bundo kandung Kota Bandar Lampung yang selalu memberikan informasi terkait tradisi adat Padang Pariaman
10. Narasumber Bapak Kamal Abdul Nasyir, Ibu Hj Nurhayati, Ibu Zalmiyanti, Bapak Alparizal, dan Bapak A. Gani yang telah bersedia di wawancarai
11. Kepada sahabat-sahabat saya Hanifah Wulandari, Leni Larasati, Wulan Difitri, Dhita Lestari, Ayi Yuntami, Rifdah Dzahabiya Zayyan, Ira Amanda, , Felida, dan juga Fatimah.
12. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam kelas C
13. Keluarag besar club Bushido yang selalu solid
14. Keluarga Besar UKM INKAI Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (hasil penelitian) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman di abad modern ini.

Bandar lampung,  
Penulis

Teresa  
NPM : 1721010067

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv

## BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	2
D. Fokus Penelitian.....	6
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Signifikasi Penelitian .....	7
H. Metode Penelitian .....	8

## BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dalam Hukum Islam .....	14
1. Pengertian Perkawinan .....	14
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	20
3. Rukun dan Syarat Perkawin .....	24
4. Tujuan Perkawinan .....	27
5. Hukum Nikah .....	30
B. <i>Khitbah</i> .....	32
1. Pengertian <i>Khitbah</i> .....	32
2. Dasar Hukum <i>Khitbah</i> .....	34
3. Macam-macam <i>Khitbah</i> .....	37
4. Ketentuan <i>Khitbah</i> .....	39
5. Melihat Batas Wanita yang di <i>Khitbah</i> .....	41

6. Hikmah <i>Khitbah</i> .....	43
C. Walimah .....	46
1. Pengertian Walimah .....	46
2. Dasar Hukum Walimah .....	47
3. Hikmah Walimah .....	48
D. <i>URF</i> .....	48
1. Pengertian <i>Urf</i> .....	48
2. Dasar Hukum <i>Urf</i> .....	50
3. Macam-macam <i>Urf</i> .....	53
4. Macam-macam <i>Urf</i> Sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam .....	56
5. Kaidah-kaidah <i>Urf</i> .....	59
E. Tinjauan Pustaka .....	60

### **BAB III OBJEK DATA PENELITIAN**

A. Latar Belakang Sejarah Uang Jemputan .....	64
B. Pengertian Uang Jemputan .....	70
C. Pengertian Perkawinan Adat .....	71
D. Peminangan dalam Adat Minangkabau .....	80
E. Tahapan Pelaksanaan Perkawinan Adat .....	83
F. Profil Kota Bandar Lampung .....	84
G. Sejarah PKDP .....	86
H. Data Penelitian .....	87

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Uang Jemputan dalam Perkawinan Masyarakat Adat Padang Pariaman di Bandar Lampung .....	95
B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Uang Jemputan .....	96

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	104
B. Rekomendasi .....	105

### **DAFTAR PUSTAKA** **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. (Daftar Masyarakat Yang Melaksanakan Uang Jemputan).....	92

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan maksud dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang penulis maksud. Judul penelitian yang dibahas adalah : Tradisi Uang Jemputan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Padang Pariaman Perantauan di Bandar Lampung Dalam Perpektif Hukum Islam. Adapun maksud dan pengertiannya, dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

1. Tradisi uang jemputan dalam perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman adalah kebiasaan turun temurun dalam adat perkawinan yang menjadi ciri khusus masyarakat daerah Padang Pariaman yang dilakukan oleh keluarga pengantin perempuan dengan memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki sebelum akad dilangsungkan.
2. Perantauan di Bandar Lampung orang yang bertempat tinggal di Bandar Lampung yang berasal dari daerah lain.
3. Perpektif Hukum Islam adalah pandangan mengenai aturan wahyu Allah dan juga sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>. Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (November 2017), h. 322

Dari beberapa penjelasan istilah di atas dapat ditegaskan bahwasanya yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk menjelaskan praktik tradisi uang jempukan adat Padang Pariaman di Bandar Lampung dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi uang jempukan adat Padang Pariaman.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Alasan objektif dari penelitian ini adalah tradisi uang jempukan ini nampaknya memberatkan pihak pengantin perempuan karena memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki karena tradisi perkawinan masyarakat Padang Pariaman di Bandar Lampung umumnya yang memberikan sejumlah uang dan melamar atau *khitbah* dilakukan oleh pihak laki-laki bukan pihak perempuan dan juga tradisi uang jempukan ini kelihatannya bertentangan dengan hukum Islam.

### **2. Alasan Subjektif**

Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tempuh sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Keluarga Islam yang meliputi hukum keluarga di mana perkawinan adalah bagian dari kajian perkuliahan.

## **C. Latar Belakang**

Perkawinan menurut Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI menyebutkan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan



juga melaksanakan ibadahnya.<sup>3</sup> Perintah menikah ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al-quran diantaranya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النُّور  
 (24: 32)

“Dan kawinilankanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayanya yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya” (Q.S An Nur (24) : 32)

Perintah untuk melangsungkan perkawinan ditemukan dalam beberapa hadis Nabi, seperti yang diriwayatkan Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah saw bersabda

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ لَشَبَابٍ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ  
 فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ  
 وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>4</sup>

“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami : Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “Al-baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu” . Muttafaq Alaih.”<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Instruksi Presiden No 1 Tahun 1999, Kompilasi Hukum Islam Tentang Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 2

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Kitab Bulughul Maram Min Ahyati Ahkam* (Indonsia : Pustaka Islam), h. 208

<sup>5</sup> *Ibid*

Dalam pandangan Islam selain perkawinan merupakan perbuatan ibadah, dan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah artinya menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>6</sup>

Islam menginginkan pasangan suami istri membangun rumah tangga melalui akad nikah yang bersifat langgeng. Terciptanya keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Dalam firman Allah disebutkan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذَّارِيَات (51) :

(49

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (Q.S: Adz Zariyat (51) : 49)

Hukum adat Indonesia beraneka ragam yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, agama, nilai-nilai dan norma yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat hukum adat tersebut. Pernikahan menurut adat Minangkabau yaitu pembentukan sebuah keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang pria dan wanita melalui restu dan persetujuan dari semua sanak keluarga.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Anatara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana Prenamedia Group , 2006 ), h.41.

<sup>7</sup> Fiony Sukmasari dan Amir M.S, *Traditional Wedding of Minangkabau* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2009), h. 66.

Adat perkawinan Padang Pariaman ini memiliki perbedaan dengan adat perkawinan daerah Minangkabau lainnya, karena mempunyai tradisi *bajapuik* (menjemput pengantin laki-laki) yang mensyaratkan adanya *uang japuik* atau jemputan.

*Bajapuik (japuik)* jemput adalah tradisi perkawinan yang telah menjadi ciri khas di daerah Padang Pariaman. *Bajapuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak mempelai laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan. *Uang japuik* adalah pemberian dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang diberikan pihak perempuan pada saat acara *manjapuik marapulai* dan akan dikembalikan lagi pada saat mengunjungi mertua pada pertama kalinya (acara *manjalang*). *Uang japuik* ini sebagai tanda penghargaan kepada masing-masing pihak<sup>8</sup>

Adat perkawinan ini, termasuk dalam *adat nan diadatkan*, karena hanya terjadi di daerah tertentu saja atau hanya dilaksanakan di daerah tertentu saja dalam hal ini hanya terjadi dalam lingkup Padang Pariaman saja. Adat perkawinan ini, dilaksanakan oleh penduduk Padang Pariaman, termasuk yang telah merantau ke kota lainnya, salah satunya kota Bandar Lampung

Tradisi uang jemputan yang berasal dari Padang Pariaman tetap dilaksanakan di rantau Bandar Lampung karena menganggap adat tersebut harus terus dilestarikan dan tetap dilaksanakan meskipun tidak sepenuhnya, namun tidak semua masyarakat adat Padang Pariaman yang merantau

---

<sup>8</sup> Azwar, Welhendri. *Matrilokal dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik* (Yogyakarta : Galang Press, 2001 ), h 52-53

melaksanakan adat tersebut karena sudah berada di tanah rantau. Salah satu masyarakat Padang Pariaman di Bandar Lampung yang melaksanakannya yaitu pasangan Kemala Sri Yohana dan Tian Febriansah menikah pada tahun 2019 dengan uang jemputan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang beralamat di Jl. Turi Blok U No 3 Perum Kemiling.<sup>9</sup> Uang jemputan dalam masyarakat adat Padang Pariaman di Bandar Lampung masih tetap eksis digunakan meskipun tidak semua masyarakat rantau masih melaksanakan adat tersebut.

Berdasarkan problematika yang terjadi mengenai tradisi uang jemputan pada masyarakat Padang Pariaman tersebut itulah yang menjadikan motivasi penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan muncul sebuah pertanyaan mengapa masyarakat Minangkabau yang terkenal teguh memegang ajaran Islam terkadang untuk beberapa hal yang tidak prinsipal memiliki kecenderungan yang berbeda dengan kecenderungan yang dianjurkan oleh Islam dan uang jemputan nampaknya memberatkan pihak pengantin perempuan. Penulis tertarik meneliti bagaimana praktik uang jemputan pada masyarakat Padang Pariaman yang berada di rantau Bandar Lampung, dan bagaimana Islam memandang uang jemputan yang berlaku di dalam masyarakat adat Padang Pariaman tersebut.

#### **D. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Tradisi Praktik Uang Jemputan dalam perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman di perantauan Bandar Lampung.

---

<sup>9</sup> Zalmiayanti, wawancara dengan yang menjalankan adat, Bandar Lampung, 17 Juli 2020.

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik tradisi uang jempukan dalam perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman perantauan di Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik tradisi uang jempukan dalam perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman perantauan di Bandar Lampung ?

### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui tradisi praktik uang Jemputan dalam perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman perantauan di Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi praktik uang jempukan dalam perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman perantauan di Bandar Lampung

### **G. Signifikasi Penelitian**

Signifikasi dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis, signifikasi kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan mengenai kajian praktik tradisi uang jempukan dan nilai-nilai yang dapat diambil dari diterapkannya uang jempukan di dalam perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman Perantauan di Bandar Lampung serta pandangan Islam tentang uang jempukan tersebut.

2. Secara praktis, signifikansi penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai pemahaman praktik uang jemputan dan nilai-nilai yang dapat diambil dari diterapkannya uang jemputan di dalam perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman Perantauan di Bandar Lampung serta pandangan Islam terhadap uang jemputan tersebut.

## **H. Metode Penelitian**

Penggunaan suatu metode adalah keharusan dalam sebuah penelitian supaya validitas data bisa dicapai. Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Namun sebelumnya memaparkan ketiga metode tersebut, peneliti akan menguraikan terlebih dahulu.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>10</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan manusia.<sup>11</sup> Pada penelitian ini

---

<sup>10</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan VII (Bandung : Mandar Maju, 1996), h.81

<sup>11</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 24



peneliti mengamati fenomena sosial yang terjadi di luar kebiasaan masyarakat umumnya di Bandar Lampung karena umumnya yang memberikan uang adalah pihak laki-laki dalam proses lamaran atau *khitbah*.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *dekriptif analisis* yaitu cara menganalisis data yang teliti dengan memaparkan data-data, menggambar, menafsirkan, menunjukkan suatu fenomena yang berkembang di masyarakat tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh dan dijadikan acuan. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini maka yang menjadi sumber data adalah :

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang paling utama, yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian untuk menganalisis pokok permasalahan, sumber hukum primer penulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara melalui beberapa masyarakat yang bersuku Padang Pariaman yang menjalankan tradisi uang jemputan dan tokoh adat Padang Pariaman.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h.23

Data sekunder adalah data yang mendukung data penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari buku-buku dan literatur tentang perkawinan, perundang-undangan tentang perkawinan, jurnal, dan judul-judul skripsi lain yang berkaitan dengan judul penelitian yang dimaksud.

### 3. Populasi

- a. Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya tidak terbatas.<sup>13</sup> Populasi bisa terdiri atas orang atau objek seperti luas dan jenis tanah, penggunaan sawah, perusahaan sejenis dan sebagainya.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini masyarakat adat Padang Pariaman yang melaksanakan tradisi jemputan terdiri dari 7 pasangan yang melaksanakan uang jemputan.
- b. Sampel merupakan bagian suatu objek yang mewakili populasi.<sup>15</sup> Sampel yang digunakan adalah 8 (delapan) orang, yang terdiri dari 5 orang yang melaksanakan uang jemputan dan 3 orang yang merupakan tokoh adat. *Sampling* akan menentukan validitas eksternal dari suatu hasil penelitian.<sup>16</sup>
- c. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, teknik ini dilakukan dengan cara memilih sampel secara cermat serta mengambil orang atau objek penelitian yang selektif

---

<sup>13</sup> Salmon Praiji Pratama, “*Problematika Penerapan Metode Field Research untuk penelitian arsitektur vernacular di Indonesia*,” h.59

<sup>14</sup> *ibid*

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h.

<sup>16</sup> *Ibid.*

dan memiliki ciri-ciri yang spesifik.<sup>17</sup> Dengan pertimbangan tertentu, peneliti memilih individu yang benar-benar memiliki pengetahuan yang mempunyai dengan topik yang akan diteliti.<sup>18</sup> Adapun individu yang dimaksud adalah masyarakat Padang Pariaman perantau di Bandar Lampung yang melaksanakan adat uang jemputan dan tokoh adat yang mengetahui mengenai pelaksanaan uang jemputan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>19</sup> Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode wawancara. Kaitannya dengan penelitian ini adalah penulis dapat menggunakan metode dokumentasi ini untuk

---

<sup>17</sup> Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta :PT. Bumi Aksara, 2006), h. 46

<sup>18</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Data Sekunder*, (Depok :PT. Raja Grafindi, 2014), h.22

<sup>19</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.143.

mengumpulkan informasi mengenai uang jempukan baik dari buku, maupun dari jurnal yang telah ditulis sebelumnya.

b. Wawancara

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya yaitu: Metode interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>20</sup> Kaitan metode wawancara dengan penelitian ini adalah metode wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang pasti dan jelas secara langsung mengenai pelaksanaan uang jempukan di Bandar Lampung.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) adalah suatu kegiatan mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah valid, benar, lengkap, sesuai atau relevan dengan masalah yang hendak diteliti.<sup>21</sup>
- b. Penandaan Data (*coding*), yakni pemberian tanda pada data yang diperoleh baik permohonan atau penggunaan tanda, simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok, klasifikasi data

---

<sup>20</sup> Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 63.

<sup>21</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif Data Sekunder* (Depok : PT. Raja Grafindo, 2014), h. 32

sesuai dengan masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk mengkaji data secara sempurna dan memudahkan analisis data.<sup>22</sup>

Sistematisasi, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah, dalam hal ini penulis mengelompokan data secara sistematis, dari yang sudah diteliti dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.<sup>23</sup>

## 6. Analisis Data

### a. Metode Berfikir Induktif

Metode berfikir Induktif, yaitu: Suatu penelitian dimana berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>24</sup> Berkaitan dengan proposal ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa praktik tradisi uang jempukan pada perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman di Bandar Lampung dan dihubungkan dengan hukum Islam yang bersifat umum yang dilaksanakan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 41

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan

Nikah secara bahasa memiliki arti sebenarnya *haqiqat* yakni *dham* yang artinya menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah memiliki arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti membuat perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam makna kiasan lebih banyak diketahui dibandingkan dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.

- a. Menurut ahli ushul fiqh golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazai* (*methaporic*) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita
- b. Menurut ahli *ushul* golongan Syafi’i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* adalah setubuh
- c. Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazim, dan sebagai ahli *ushul* dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyariat artinya antara akad dan setubuh.<sup>25</sup>

Para ahli fikih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 45.



- a. Penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena merupakan peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- b. Penggunaan ungkapan: (يتضمن اباحة الوطء) yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.
- c. Menggunakan kata (بلفظ انكاح او تزويج) yang berarti menggunakan lafaz na-ka-ha atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata na-ka-ha dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam Islam di samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga, perbudakan. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tapi menggunakan kata, *tasarri*. Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual

antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datang dari syara.<sup>26</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur bahasa Arab disebut dalam dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata tersebut yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan juga banyak terdapat dalam Al-quran dan hadis Nabi.<sup>27</sup>

a. Perkawinan secara istilah berdasarkan pasal 2 KHI yaitu akad yang sangat kuat atau *mitisaqan ghaliz* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan dalam pasal 3 KHI untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*. Jadi, perkawinan dalam arti sempit adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sedangkan arti perkawinan dalam makna yang luas adalah akad atau ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warohmah*.<sup>28</sup>

Jika melihat perkawinan dari segi sosial dari setiap bangsa maka dapat ditemui penilaian di mana yang umumnya orang yang berkeluarga atau berumah tangga lebih dihargai dari mereka yang tidak menikah. Zaman dahulu wanita bisa dimadu sebanyak-banyak tanpa adanya batasan,

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.1 (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 74 -75.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang* (Jakarta : Kencana Pramedia Group), h. 35

<sup>28</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 42-43.

kemudian Islam datang dan memuliakan wanita, dan ajaran Islam wanita boleh dipoligami dibatasi paling banyak empat orang dan terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Dalam segi agama perkawinan adalah hal yang sangat penting dan juga suci, upacara perkawinan adalah upacara yang suci yang dimana kedua belah pihak dihubungkan sebagai pasangan suami dan isteri.<sup>29</sup>

Melihat dari segi ini perkawinan merupakan suatu perjanjian terdapat di dalam Al-quran :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ  
مِّيثَاقًا غَلِيظًا (النساء (4) : 21)

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Q.S An Nisa (4) : 21)

- b. Ensiklopedi hukum Islam, menyebutkan bahwa nikah adalah salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga dan juga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan dan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas

---

<sup>29</sup>*Ibid.* h.44

bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah swt terhadap hamba-Nya.<sup>30</sup>

- c. Hasbi Ash-Shiddieq memberikan pengertian nikah yaitu akad yang memberikan manfaat hukum kebolehan untuk melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing.<sup>31</sup>

Para ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi perkawinan namun perbedaan itu tidak terdapat pertentangan yang tajam, namun hanya ada perbedaan sudut pandang.

- d. Menurut Sayuti Thalib perbedaan itu lebih memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan di satu pihak, sedang di lain pihak dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan, unsur yang lain dijelaskan dalam tujuan bukan perumusan. Pendapat ini setidak-tidaknya dapat ditelaah dari beberapa perumusan mengenai pengertian atau definisi perkawinan antara lain :

- e. Ahmad Azhar Bashir merumuskan nikah adalah melakukan suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengingatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belak pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belak pihak untuk

---

<sup>30</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h 1329.

<sup>31</sup> Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 96

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.<sup>32</sup>

- f. Mahmud Yunus, merumuskan perkawinan adalah *aqad* antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. *Aqad* adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.<sup>33</sup>
- g. Sulaiman Rasyid, merumuskan perkawinan adalah *aqad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolonglah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>34</sup>
- h. Abdul Sidik, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin<sup>35</sup>
- i. Soemanti, nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sembarangan perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.<sup>36</sup>
- j. Zahri Hamid menulis sebagai berikut yang dinamakan nikah menurut syara ialah *aqad* (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan

---

<sup>32</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam* ( Jakarta : Kencana , 2010 ), h 258-261

<sup>33</sup> *ibid*

<sup>34</sup> *ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*

ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.<sup>37</sup>

- k. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>38</sup>
- l. Perkawinan menurut Islam di dalam KHI adalah pernikahan, yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *miitsiqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadahnya.<sup>39</sup>

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak ada pertentangan satu sama lain, karena pada intinya secara sederhana dapat disimpulkan hakikat nikah adalah *aqad* yang menghalalkan hubungan suami istri dengan tujuan beribadah kepada Allah swt, melanjutkan keturunan, menyalurkan hawa nafsu, dan menjaga ketentraman jiwa.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh Nabi. Banyak suruhan-suruhan oleh Allah dalam Al-quran untuk melaksanakan perkawinan. Di antara firman Allah sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*



## a. Al-quran

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

(النور (24) : 32)

“Dan kawinilankanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayanya yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya” (Q.S An Nur (24) : 32)

Makna dari surat An Nur ayat 32 ini adalah seorang pria yang ingin menikah namun dia khawatir tidak sanggup menafkahi perempuan yang akan dijadikan istrinya.

## b. Hadis Rasulullah saw

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ (رواه إمام البخاري)<sup>40</sup>

“ Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah saw Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa”<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Imam Bukhori, *Shahih Adabul Mufrad*, terjemahan Al Adabul Mufrod (Bekasi : Pustaka As-Shahihah), h. 315

<sup>41</sup> *Ibid*

Makna dalam hadis ini adalah menikah melindungi orang dari zina, sementara menjaga kehormatan dari zina termasuk salah satu yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah saw dengan surga.

رواه ابو امامة رضي الله عنه: تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى (رواه البيهقي)<sup>42</sup>

“Diriwayatkan oleh Abu Ummamah Radhiyallahu anhu: Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari Kiamat, dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani.”<sup>43</sup>

Makna hadis Nabi saw ini adalah menganjurkan kita dalam banyak hadis agar menikah dan melahirkan anak. Beliau menganjurkan kita mengenai hal itu dan melarang kita hidup membujang, karena perbuatan ini menyelisihi sunnahnya.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ  
قَالَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ  
(رواه الترمذي)<sup>44</sup>

“At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu, ia menuturkan bahwa Rasulullah saw bersabda ada empat perkara

<sup>42</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Kitab Bulughul Maram Min Ahyati Ahkam* (Indonsia : Pustaka Islam), h. 208

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Imam Bukhori, *Shahih Adabul Mufrad*, terjemahan Al Adabul Mufrod (Bekasi : Pustaka As-Shahihah) h. 320

yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.<sup>45</sup>

Makna dari hadis tersebut adalah menikah merupakan sunah Rasulullah saw

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ  
(الانبیاء (21) : 89)

“Dan (ingatlah kisah) Zakariya, tatkala ia menyeru Rabb-nya: ‘Ya Rabb-ku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkau-lah Waris Yang Paling Baik” (Q.S Al-Anbiyaa (21): 89)

Makna dari Al-quran surat Al Anbiya ayat 89 adalah Nabi Zakriya memohon kepada Allah swt untuk di karuniai anak sebagai pewaris beliau yaitu seorang Nabi, untuk mendapatkan ahli waris atau mendapatkan keturunan hanya dengan menikah.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ  
عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي ، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي  
(رواه ابن ماجه)<sup>46</sup>

“Mewartakan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar, mewartakan kepada kami Adam, mewartakan kepada kami Isa bin Maimun, dari Al-Qasim, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw bersabda:

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Sunan Ibn Majah, *Kitab An-Nikah*, (Beirut: Dar alFikr, 1995 M/1415 H), Juz 1, 580

Menikah bagian dari sunahku. Siapa yang tidak melakukan sunahku, maka bukan bagian dari golonganku”<sup>47</sup>

Makna dari hadis ini pernikahan merupakan sunnah Rasul maka apabila yang menentang pernikahan bukan ummat Rasulullah saw.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Unsur-unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang akan menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. *Ijab* yang akan dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.<sup>48</sup>

Selain dari yang telah disebutkan di atas merupakan rukun perkawinan yang wajib dipenuhi oleh setiap seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan atau perkawinan. Dari masing-masing rukun tersebut diharuskan untuk memenuhi persyaratan tersebut :

- c. Bagi calon mempelai laki-laki disyaratkan :
  1. Bukan mahram dari calon isteri

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid.* h 61

2. Tidak terpaksa atau kemauan sendiri
  3. Orang tertentu atau jelas orangnya
  4. Tidak sedang menjalankan ihram haji.<sup>49</sup>
2. Bagi calon mempelai wanita disyaratkan :
- a. Tidak ada halangan hukum : Tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
  - b. Merdeka atas kemauan sendiri.<sup>50</sup>
3. Wali
- a. Telah dewasa dan berakal sehat
  - b. laki-laki
  - c. Muslim
  - d. Orang merdeka
  - e. Tidak dalam pengampuan
  - f. Berpikiran baik
  - g. Adil
  - h. Tidak sedang melakukan ihram<sup>51</sup>
4. Saksi
- a. Saksi berjumlah dua orang
  - b. Kedua saksi beragama Islam
  - c. Kedua saksi adalah orang merdeka
  - d. Kedua saksi adalah laki-laki

---

<sup>49</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada media Group, 2016), h. 37-38.

<sup>50</sup> *Ibid* h. 39-40.

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana Pramedia Group), h. 77

e. Kedua saksi adil

f. Kedua saksi dapat mendengar dan melihat.<sup>52</sup>

Dalam KHI syarat calon suami dan isteri sebagai berikut :

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu calon suami dan istri sudah mencapai umur 19 tahun.
- b. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Maka bentuk dari persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- c. Sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Apabila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bila calon mempelai ada yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
- d. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 83



- e. Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI<sup>53</sup>

#### 4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya merupakan terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya. Sehingga timbul kebahagiaan yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>54</sup> Sebagaimana dalam agama Islam tujuan substansial perkawinan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut yaitu :

##### 1. Pembersihan moralitas manusia

Perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan cara yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan jalan yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah. Karena setiap manusia mempunyai nafsu sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-quran yang berbunyi :

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي ۚ  
غَفُورٌ رَحِيمٌ (يوسف 53)

<sup>53</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), h. 5.

<sup>54</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munaqahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), h. 22

“Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, maha penyayang” (Q.S Yusuf (12) : 53)

## 2. Mengangkat harkat dan martabat

Dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliah ketika kedudukan perempuan diposisikan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap waktu dapat diperjualbelikan bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.<sup>55</sup>

## 3. Mereproduksi keturunan

Agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah, dan juga agar setiap makhluk manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.<sup>56</sup>

Keinginan untuk melanjutkan keturunan adalah naluri atau *gazirah* umat manusia yang bahkan juga *gazirah* bagi makhluk hidup di bumi ini yang diciptakan Allah. Allah menciptakan bagi manusia nafsu shahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu shahwat tersebut. Untuk memberikan saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui perkawinan. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan

---

<sup>55</sup> M. Faisol, *Hermeneutika Gender Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith* (Malang : UIN Maliki Press, 2011), h. 40-41

<sup>56</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munaqahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 23.

ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم  
(30):21)

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Q.S Ar Rum (30) : 21 )

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia bisa saja ditempuh dengan melalui jalur di luar perkawinan, namun untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.<sup>57</sup>

Tujuan adanya perkawinan adalah keluarga yang :

- a. Sakinah, artinya tenang
- b. Mawaddah, artinya keluarga yang terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
- c. Rahmah, artinya keluarga yang di dalamnya terdapat kasih sayang, yaitu hal-hal yang bersifat kerohanian.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang*, (Jakarta : Kencana Pramedia Group) h. 47

<sup>58</sup> Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah”, *Jurnal Rausyan Fikr*. Vol. 14 No.(1 Maret 2018) h. 114

## 5. Hukum Nikah

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu :

- a. Wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
- b. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- c. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- d. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya.
- e. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.<sup>59</sup>

Ulama Syafi'iah terperinci menyatakan bahwa hukum perkawinan itu dengan melihat pada keadaan orang-orang tertentu. Sunnah hukumnya bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah memiliki perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan. Makruh hukumnya bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum mempunyai keinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk

---

<sup>59</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* Vol. 14 No. 2 – (2016), h. 189

perkawinan juga belum dimiliki. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun secara fisik cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.<sup>60</sup>

Ulama Hanafiah menambahkan lagi hukum secara khusus bagi keadaan-keadaan dan orang-orang tertentu, yaitu wajib bagi orang yang telah pantas untuk kawin, telah memiliki keinginan untuk kawin dan juga memiliki perlengkapan untuk kawin dan dia juga takut melakukan perbuatan zina apabila dia tidak kawin. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinan itu.<sup>61</sup>

Hukum menikah menurut mazhab Hambali pada dasarnya adalah sunnah. Akan tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi mubah ketika orang tersebut tidak ada hasrat untuk menikah dan juga tidak khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Dapat juga berubah menjadi wajib bagi orang yang khawatir jatuh pada perzinahan ketika ia tidak menikah.<sup>62</sup>

Menurut mazhab Maliki hukum menikah menjadi wajib apabila memenuhi tiga syarat, yaitu khawatir melakukan zina, tidak mampu berpuasa atau mampu tapi puasanya tidak bisa mencegah terjadinya zina, tidak mampu memiliki budak perempuan (amal) sebagai pengganti isteri dalam istimta'. Hukum menikah menjadi haram apabila tidak khawatir zina dan tidak mampu memberi nafkah dari harta yang halal atau atau tidak mampu jima', sementara isterinya tidak ridho. Hukum menikah menjadi

---

<sup>60</sup> *Ibid.* h.46

<sup>61</sup> *Ibid.* h. 72

<sup>62</sup> Ponpes Al-Falah, *Fiqih Lintas Mazhab*, (Kediri: 2010), h. 1-2

sunnah apabila tidak ingin untuk menikah dan ada kekhawatiran tidak mampu melaksanakan hal-hal yang wajib baginya. Hukum menikah menjadi mubah apabila tidak ingin menikah dan tidak mengharap keturunan, sedangkan ia mampu menikah dan tetap bisa melakukan hal-hal sunnah<sup>63</sup>

## **B. *Khitbah***

### **1. Pengertian *Khitbah***

Seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, Islam sudah mengatur mengenai tata cara peminangan. Hal ini penting dilakukan agar kehidupan rumah tangga nantinya berjalan dengan baik, penuh kasih sayang dan juga rasa kebahagiaan. Kata *khitbah* berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah meminang atau melamar. Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang.

Secara etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain).<sup>64</sup> Secara terminologi, peminangan adalah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>65</sup>

Peminangan di dalam ilmu fiqh disebut dengan “*khitbah*” yang

---

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 3

<sup>64</sup> Dep. Dikbud, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1994, cet. Ke-3, edisi ke-2, h. 556

<sup>65</sup> M. A. Tihami, *Fikih Munakahat, Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali Press 2009), h. 24

artinya permintaan. Menurut istilah, peminangan artinya pernyataan atau permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan secara langsung ataupun dengan melalui perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai tentu saja dengan ketentuan-ketentuan agama.<sup>66</sup>

Meminang artinya ialah seorang laki-laki meminta terhadap seorang perempuan untuk menjadi istrinya, menggunakan cara-cara yang telah umum berlaku di dalam masyarakat. Meminang merupakan usaha pendahuluan sebelum pernikahan.<sup>67</sup>

Kata *Khitbah* adalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian keinginan untuk melangsungkan ikatan perkawinan. *Khitbah* merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari<sup>68</sup>

Dari beberapa definisi yang dijelaskan ditarik sebuah pengertian bahwa peminangan yang bersifat umum, bahwa peminangan merupakan kegiatan awal sebagai upaya menuju terjadinya perijodohan diantara kedua belah pihak sebelum akad nikah dilaksanakan. Istilah peminangan tetap berlaku dengan tidak memandang dari pihak mana dulu yang memulainya, baik dari pihak laki-laki kepada perempuan, ataupun sebaliknya. Karena hal tersebut hanya didasarkan pada adat yang berlaku dalam suatu masyarakat

---

<sup>66</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 23

<sup>67</sup> Sayyid Sabiq, *iqh Sunnah Juz VI* (Bandung: Al ma'arif, 1980), h. 38

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana Pramedia Group), h. 50

tertentu.

## 2. Dasar Hukum *Khitbah*

Terdapat dalam Al-quran sebagaimana dalam firman Allah

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ (البقرة)  
(2) : (235)

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran” (Q.S Al Baqaroh (2) : 235)

Terdapat di dalam Al-quran dan dalam banyak hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak dijelaskan dengan jelas larangan melakukan atau dilarang, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan secara jelas dan baik dalam Al-quran maupun di dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah *mubah*. Namun Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al Mujtahid* yang menukilkan pendapat Duad al Zhahiry yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.<sup>69</sup>

Meskipun hukum peminangan tidak sampai wajib, namun tetap ada hikmahnya. Adapun hikmahnya yaitu menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan setelahnya, kedua belah pihak dapat saling mengenal. Oleh sebab itu Nabi saw memberikan anjuran kepada pria yang ingin meminang untuk melihat dahulu calon istrinya, supaya tidak ada penyesalan kemudian,

---

<sup>69</sup> *Ibid* 50



Rasulullah saw bersabda :

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ ثَعْبَةَ قَالَ جَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتَ قُلْتُ لَا قَالَ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمْ (رواه الترمذي)<sup>70</sup>

“Dari al-Mughirah bin Syu'bah ia berkata, "saya meminang seorang wanita, Rasulullah saw. lalu bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah melihatnya?" saya menjawab: "belum." beliau bersabda: "lihatlah ia karena itu akan lebih memantapkan kalian berdua." Lihatlah ia, sebab itu lebih patut untuk melanggengkan di antara kalian berdua”. (HR Ahmad<sup>71</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (أَيَّ أَرَادَ ذَلِكَ) أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا : قَالَ : إِذْ هَبْتُ فَانْظُرُ إِلَيْهَا<sup>72</sup>

“Dari Abu Hurairah Nabi bersabda kepada seseorang yang akan mengawini seorang wanita.”sudahkah engkau melihat wanita itu? “Dia berkata”, belum, kemudian Nabi memerintahkan,”pergi dan lihatlah dia”<sup>73</sup>

<sup>70</sup> Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad alSyaibani, Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz 4, h. 244

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, juz 3 (Kairo : Darussalam, 2006), h.1238

<sup>73</sup> *Ibid*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا،  
 فَلْيَفْعَلْ (رواه أبو داود)<sup>74</sup>

“Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah saw bersabda: Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahnya maka lakukanlah”<sup>75</sup>

*Khitbah* dalam hukum Islam bukan hal yang wajib dilalui, dan juga merupakan tahap yang umumnya pada setiap akan melangsungkan perkawinan. Tradisi *khitbah* tidak saja berlangsung setelah agama Islam datang tetapi ada sebelum Islam datang. Kini tradisi *khitbah* sudah menjadi tradisi yang banyak dilakukan di semua tempat di belahan bumi ini, termasuk di dalam hukum adat, dengan tata cara yang berbeda sesuai adat masing-masing.

Pada dasarnya pihak laki-laki yang *mengkhitbah* pihak perempuan, akan tetapi hukum *syara* menetapkan perempuan boleh meminang lelaki berdasarkan hadis dari Sahl bin Sa’ad (ia) berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأَ طَأَ

<sup>74</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Panduan Lengkap masalah fiqh* terjemahan Irfan hakim (Indonsia : Pustaka Islam), h.401

<sup>75</sup> *Ibid*

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأْسُهُ، فَلَمَّارَاتِ الْمَرْأَةِ  
 أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْعًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)<sup>76</sup>

“Rasulullah shallallahu alaihi wasalam seraya berkata: “Wahai Rasulullah, aku datang untuk memberikan (menghibahkan) diriku kepadamu.” Lalu Rasulullah saw melihat kepadanya. Beliau melihat kepadanya ke atas dan ke bawah berulang kali, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Maka tatkala perempuan itu melihat bahwasanya beliau tidak memutuskan sesuatu tentang dirinya, ia pun duduk ”<sup>77</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991:

Pasal 11: Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya..

Pasal 13: (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangan, (2) kebebasan memutuskan hubungan pinangan dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

### 3. Macam-macam *Khitbah*

Ada beberapa macam peminangan, diantaranya sebagai berikut:<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Kitab Bulughul Maram Min Ahyati Ahkam* (Indonsia : Pustaka Islam), h. 210

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011) h.6492

- a. Secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan, seperti ucapan, "saya berkeinginan untuk menikahimu."
- b. Secara tidak langsung yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah kinayah. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti pengucapan, "tidak ada orang yang tidak sepertimu."

Adapun sindiran selain ini yang dapat dipahami oleh wanita bahwa laki-laki tersebut ingin menikah dengannya, maka semua diperbolehkan. Diperbolehkan pula bagi wanita untuk menjawab sindiran ini dengan kata-kata yang berisi sindiran juga. Tidak terlarang bagi wanita mengatakan kata-kata sindiran yang diperbolehkan lakilaki, demikian pula sebaliknya.<sup>79</sup>

Perempuan yang belum kawin atau sudah kawin dan telah habis pula masa iddahnya boleh dipinang dengan ucapan langsung atau terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindiran atau tidak langsung. Akan tetapi bagi wanita yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, tidak boleh meminangnya dengan menggunakan bahasa terus terang tadi.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2* Jilid 3-6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 378.

<sup>80</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana Pramedia Group), h. 50

#### 4. Ketentuan *Khitbah*

Secara syariat, wanita yang boleh dikhitbah memiliki beberapa persyaratan, diantaranya:

1. Bukan wanita yang haram dinikahi, terbagi dalam dua kategori, yaitu:
  - a. Wanita yang diharamkan untuk selamanya, ini terbagi menjadi tiga<sup>81</sup> yaitu adanya hubungan *nasab* (keturunan), sesusuan dan *musoharoh*
  - b. Wanita yang diharamkan dalam batasan waktu, diantaranya: dua bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang sama wanita yang masih dalam *iddah*, wanita yang ditalak tiga hingga dia menikah dengan pria lain wanita yang sedang ihrom, haram bagi pria kafir sampai menjadi muslim, wanita kafir hingga memeluk Islam, istri pria lain, wanita pezina atau pelacur diharamkan hingga dia bertaubat serta selesai dari masa iddahnya.<sup>82</sup>
2. Bukan wanita yang menjalani masa *iddah*.<sup>83</sup>
  - a. Masa *iddah* yang disebabkan meninggalnya suami.
  - b. Masa *iddah* yang disebabkan talak *ba'in*, para ulama sepakat bahwa tidak bolehnya meminang wanita pada masa *iddah* talak *ba'in qubra* (talak 3 kali), talak *ba'in qubra* ini membuat pasangan suami istri memutuskan hubungan, tidak ada harapan untuk kembali sebelum dinikahi oleh pria lain, hal ini berbeda dengan talak *ba'in sugrah*,

---

<sup>81</sup> Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan UU perkawinan* (Liberty: Yogyakarta, 2007), h. 33.

<sup>82</sup> Muhammad Saleh Al-Usmani, *Pernikahan Islami: Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga* (Risalah Gusti, 1991), h. 11

<sup>83</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 80.

dimana wanita yang ditalak (2 kali) masih halal bagi suami untuk rujuk dengan akad nikah dan mahar yang baru.

c. Masa iddah yang disebabkan talak *raj'i* (suami boleh kembali ke istri karena talaknya belum 3 kali) dimana istri yang ditalak masih berstatus istri, suami boleh kembali ruju' tanpa adanya akad serta mahar.

d. Masa iddah yang disebabkan khulu atau fasakh, wanita yang iddah disebabkan *khulu*, atau karena *fasakh* disebabkan suami tidak memberikan nafkah atau menghilang/tidak pernah pulang

3. Bukan perempuan yang (menyetujui) sudah dikhitbah oleh pria lain.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ  
الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ (رواه ابن امة)

“Dari Abi Hurairah, ia berkata Rasulullah saw bersabda: "Tidak boleh seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya."

Tentang perempuan yang boleh dan tidak boleh dinikahi disebutkan dalam pasal 12 yang secara lengkap yaitu

(1) Peminangan dapat dilakukan terhadap wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddahnya*

(2) wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah *rajiyyah* haram dan dilarang untuk dipinang

(3) dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita

(4) putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

## 5. Ketentuan Melihat Batas Wanita yang di *Khitbah*

Meskipun hadis Nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang, namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Dalam hal ini terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama menetapkan yang boleh dilihat yaitu hanya muka dan telapak tangan. Yang menjadi dasar bolehnya melihat dua bagian badan itu adalah hadis Nabi dari Khalid ibn Duraik dari Aisyah menurut riwayat Abu Daud.

ان اسماء بنت ابي بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم  
وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها وقال ان المرأة اذا بلغت  
المحيض لم يصلح لها ان يرى منها الا هذا وهذا و اثار  
الي وجهه و كففيه (رواه ابو داود)<sup>84</sup>

“Asma binti Abi Bakar masuk kerumah Nabi sedangkan dia memakai pakaian yang semoit, Nabi berpaling daripadanya dan berkata : hai Asma’ bila seorang perempuan telah haid tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Nabi mengisaratkan kepada muka dan telapak tangan”<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana Pramedia Group), h. 50

<sup>85</sup> *Ibid*

Alasan dipadakan dengan muka dan telapak tangan saja, karena dengan melihat muka dan telapak tangan dapat diketahui kecantikan dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui kesuburan badannya.<sup>86</sup>

Ada juga dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh melihat perempuan yang hendak dipinang dengan berpakaian yang boleh dilihat oleh ayah dan mahramnya yang lain, akan tetapi pria tersebut boleh pergi dengan disertai oleh ayah atau salah seorang dari mahramnya untuk mengetahui kecerdikan, perasaan dan kepribadian calon istri.<sup>87</sup>

Dalam proses *nazar* (melihat calon istri) terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, pertama calon suami telah memiliki niat kuat untuk menikah. Kedua, batasan bolehnya memandang sangat terpaut dengan etika dan budaya yang esensinya ialah dapat “melihat” ketertarikan diri untuk menikahinya. Hal ini *nazar* berupa *rukhsah* (keringanan) dimana syariat membolehkan hanya bagi orang yang berniat melamar, selain itu maka hukumnya haram. Selain itu, bukan hanya pria yang dapat “melihat” calon istri akan tetapi juga tertuju kepada wanita melihat calon suami yang hendak melamarnya.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid*, h. 56

<sup>87</sup> Quraisyh Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Cet. VIII (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 79

<sup>88</sup> Dwi Andi Lubis, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa* Cet. I (Solo: Aqwam, 2008), h. 98-100



## 6. Hikmah *Khitbah*

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan atau khitbah memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar peristiwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. *Khitbah* memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau khitbah adalah:<sup>89</sup>

- a. memudahkan jalan pengenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syari'at, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.
- b. Memperkuat tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan *khitbah*, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang

---

<sup>89</sup> Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu* (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 32.

akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.<sup>90</sup>

Sebelum melaksanakan *khitbah*, mereka belum memiliki ikatan moral apa pun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup “bebas”, belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat.

- c. Menumbuhkan ketentraman jiwa Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kehawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.

---

<sup>90</sup> Ibid, h.35

- d. menjaga kesucian diri menjelang pernikahan Dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya.
- e. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (النُّر 24): (32)

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat"...(Q.S An-Nur (24):30)

Selain itu, pinangan juga akan menjauhkan kedua belah pihak dari gangguan orang lain yang bermaksud iseng

- f. Melengkapi persiapan diri pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang biasa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya

dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

### **C. Walimah**

#### **1. Pengertian Walimah**

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur bahasa Arab yang memiliki arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perelatan di luar perkawinan. Kemudian makna ini diadopsi dari nama “makanan” dan “hidangan pengantin” yang diadakan karena adanya pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita. Maka dari itu walimah tidak pernah dipakai kecuali untuk hidangan pengantin. Inilah makna walimah menurut bahasa dan apa yang telah dikenal oleh banyak ulama.<sup>91</sup> Menurut literatur Arab bahwa walimah terjadi ketika perayaan dengan mengundang seseorang yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.<sup>92</sup>

Selain itu walimah bisa dikatakan secara etimologi memiliki arti “berkumpul”, dan dalam istilah pernikahan adalah makanan pesta pernikahan atau setiap makanan untuk undangan dan sebagainya. Karena itu dalam bahasa Indonesia sama dengan resepsi pernikahan atau pesta pernikahan. Sedangkan secara terminologi Imam Syafi’i dalam kitab Al-

---

<sup>91</sup> Saleh Al-Fauzan, *FiQih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 678.

<sup>92</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang* (Jakarta : Kencana Pramedia Group ), h. 155.

Umm menyebutkan bahwa walimah adalah tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitan atau peristiwa menggembirakan lainnya yang mengundang orang banyak, dinamakan walimah<sup>93</sup>

Walimah dalam Islam tergolong perbuatan yang *mustahab* (dianjurkan), karena merupakan suatu acara pemberitahuan adanya pernikahan dan sekaligus silaturahmi serta mohon doa restu. Akan tetapi meskipun dianjurkan walimah dalam pelaksanaannya tidak boleh berlebihan tetapi disesuaikan dengan situasi dan kewajaran<sup>94</sup>

## 2. Dasar Hukum Walimah

Hukum walimah untuk pengantin yaitu sunnah. Ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan, ada sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasan hukumnya wajib.<sup>95</sup>

Maka hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, ia mengatakan

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً ( رواه البخاري )

“Tidaklah Nabi saw, menyelenggarakan walimah atas sesuatu dari isterinya seperti beliau menyelenggarakan walimah atas diri zaenab,

<sup>93</sup> Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Al-Umm, juz VII (Beirut: Dar Al Kutub, Al-Ilmiyah, t.t), h. 476

<sup>94</sup> Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), h. 97.

<sup>95</sup> Saleh Al-Fauzan, *FiQih Sehari-Hari* ( Jakarta : Gema Insani), h.679.

beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing.”<sup>96</sup>

### 3. Hikmah Walimah Nikah

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:<sup>97</sup>

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan<sup>98</sup>

## D. *URF*

### 1. Pengertian *Urf*

Kata *urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya *urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat

---

<sup>96</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari, Achmad Sunarto, *et.al*, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), h. 95

<sup>97</sup> Slamet Abidin et. Al. *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 156.

<sup>98</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), h. 157.

manusia. Dengan adanya definisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa *urf* dan adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan).

Di samping itu, dari definisi adat dan *urf* sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah *Al-Adat* terbentuk dari mashdar *al-Aud* dan *al-Mu awadah* yang artinya adalah pengulangan kembali, sedang kata *al urf* terbentuk dari kata mashdar *al-muta'aruf*, yang artinya saling mengetahui.

Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki milayah *muta'aruf*, dan saat ini pulalah adat berubah menjadi *urf* (*haqiqat urfiyah*), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tenteram di dalam hati, kemudian menjadi *urf*.

Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan *urf* dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsip, artinya pengulangan istilah *urf* dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda

Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam tetap memberikan definisi yang berbeda, di mana *urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan penting, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori *urf*. Sedangkan adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.

Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan *urf* itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut:

Perbedaannya adalah:

1. *Urf* itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.
2. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.

Sedangkan persamaannya adalah: *urf* dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya

## **2. Dasar Hukum *Urf***

Adapun *kehujjahan urf* sebagai dalil *syara* didasarkan atas argumen argumen berikut ini



a. firman Allah :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف (7):199)

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh” (Q.S Al A’raff (7):199)

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma’ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma’ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam

b. Hadis Rasulullah

عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب

محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعه

برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب

أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على

دينه فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه احمد حنبلي)<sup>99</sup>

“Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW.

<sup>99</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, No. 3418.

Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad SAW., maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah”<sup>100</sup> (HR Ahmad Ibn Hambal).

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *urf* diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-urf* yaitu:<sup>101</sup>

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar *urf* seperti menetapkan (hukum) dengan dasar *nash*”.

Suatu penetapan hukum berdasarkan *urf* yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan *nash*. Kaidah ini banyak berlaku pada

<sup>100</sup> *Ibid*

<sup>101</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Amzah, 2010), h. 213.

*urf-urf* khusus, seperti *urf* yang berlaku diantara para pedagang dan berlaku didaerah tertentu, dan lain-lain.

### 3. Macam-Macam *Urf*

Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam *urf* dari tiga perspektif yakni:

a. Dari sisi bentuknya atau sifatnya, *urf* terbagi menjadi dua :

- 1) *Urf lafzhi* yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan kita temui dalam banyak literatur Ushul Fikih untuk, *urf* dalam bentuk ini adalah kata *walad*, yang arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri seperti dalam firman Allah swt

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ (النساء)

(4) : (11)

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki” (Q.S An-Nisa (4) : 32)

Akan tetapi kebiasaan orang-orang Arab memahami kata *walad* dengan arti anak laki-laki. Selain itu kata *dabbah* yang sebenarnya berarti binatang melata, oleh penduduk Iraq difahami sebagai keledai. Contoh yang berkenaan dengan hukum adalah kata *thalaq* dalam

bahasa Arab, yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian dipahami dengan konotasi putusnya ikatan perkawinan. Maka seseorang suami yang mengatakan kepada istrinya: *thalaqtuki* maka terjadi talak dalam pernikahan mereka.

- 2) *Urf* amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muaamalah. Seperti jual-beli tanpa ijab dan kabul, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, atau garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu bagus untuk waktu tertentu, atau jual beli dengan hantaran barang tanpa tambahan biaya. Atau memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, dan lain sebagainya

b. Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat maka *urf* ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni *urf* yang umum dan yang khusus:

- 1) *Urf* yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan *urf* yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan di kalangan mayoritas masyarakat *urf* itu bisa disebut dengan *urf* atau tidak. Ataupun *urf* yang hanya berlaku di suatu tempat saja seperti Minangkabau saja bisa dikatakan *urf* yang umum atau tidak.
- 2) *Urf* yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun

para ulama ushul fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan *urf* yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah termasuk dari *urf* yang umum atau yang khusus.

c. Sedangkan ditinjau dari keabsahannya menurut syariat *urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu: *urf* yang baik dan *urf* yang buruk, konsepnya adalah apakah sesuai dan sejalan dengan syariah atau tidak. Pembagian *urf* dalam bentuk inilah yang menjadi pusat kajian para ulama ushul dalam kajian *urf*. Maka tidak mengherankan bila beberapa kajian sekilas tentang *urf* hanya akan mengemukakan pembagian *urf* dari segi kesesuaiannya dari syariah atautkah tidak.

1) *Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-quran al-karim ataupun sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai. Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dalam kajian sejarah di mana kemudian Al-quran al-karim ataupun sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan. Selain cadar dan konsep haram, kita

juga bisa melihat mahar, sunnah atau tradisi, denda, poligami dan lain sebagainya.

- 2) *Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara. Seperti praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka *urf-urf* yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung.

#### 4. Macam-Macam *Urf* Sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam

*Urf* dapat menjadi sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari *nash-nash* yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa *urf* tersebut harus merupakan, *urf* yang mengandung kemaslahatan dan *urf* yang dipandang baik. Para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut: <sup>102</sup>

- a. *Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

---

<sup>102</sup> Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Am* (Beirut: Dar al-Fikr, 1967-1968) h. 873.; Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 874.; dan Abdul Azis al-Khayyath, *Nadzariyyah al-Urf*, (Amman: Maktabah al-Aqsha, 1977), h. 52-57.

- b. *Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

Dalam kaitanya dengan hal ini terdapat kaidah ushuliyyah yang berbunyi:

لا عبشة نهعشف انطاسى

“*Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama*”.<sup>103</sup>

- c. *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *urf* itu tidak berlaku lagi.<sup>104</sup> Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan, *urf* atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Karena *urf* itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.<sup>105</sup>
- d. *Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash-nash qath'i* dalam syara.<sup>106</sup> Jadi *urf* dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada *nash qath'i* yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat

<sup>103</sup> Zainal Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazhair ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man*, (Mesir: Mu'assasah al-Halabi wa Syurakah, 1968), h. 133.

<sup>104</sup> Izzudin ibn , Abd Salam, *Qawa'd al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), Jilid II, h. 178.

<sup>105</sup> Subhi Mahmarshani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kasyshaf, 1961), h 242.

<sup>106</sup> Al-Zarqa, Musthafa Ahmad, *Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), Jus II, h. 880.

dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana.

*Urf* yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan Al-quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( المائدة (5): 90)

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Q.S Al-Maidah (5) : 90)

Apabila dengan mengamalkan *urf* tidak berakibat batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar’i atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka *urf* tersebut dapat dipergunakan<sup>107</sup>

Dengan persyaratan tersebut di atas para ulama memperbolehkan penggunaan *al urf* sebagai sumber hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara *al urf* dengan *nash* Al-quran sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan *al urf* sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya otoritarianisme di

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, h. 881



kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan bahwa Al-quran, yang bersifat abadi itu, sebagai sumber hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi.

### 5. Kaidah-kaidah *Urf*

Di terimanya *urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Karena di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* yang dapat di tampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya di bentuk oleh mujtahid berdasarkan *urf*, akan berubah bilamana *urf* itu berubah.

Ada beberapa kaidah fihiyyah yang berhubungan dengan *urf*, di antaranya adalah:

#### 1. Adat itu adalah hukum

Apa yang telah ditetapkan oleh syara secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, maka ia dikembalikan pada *urf*. Abdul Hamid Hakim mendasarkan dua kaidah atas ayat dalam Al-quran

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف (7)

(199 :

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”

(Q.S Al Araf (7) : 199)

2. Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.
3. Yang baik itu jadi *urf* seperti yang disyaratkan jadi syarat
4. Yang ditetapkan melalui *urf* seperti yang ditetapkan melalui nash

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum di sini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui Al-quran dan sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui *urf* itu sendiri.<sup>108</sup>

#### E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terhadap permasalahan yang penulis kemukakan sebelumnya sudah ada skripsi yang membahas mengenai skripsi ini. Namun pokok pembahasannya berbeda dengan yang penulis bahas, diantaranya yaitu :

1. Ririanty Yunita. Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2012 telah menulis jurnal yang berjudul “Uang *Japuik* dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung”. Fokus penelitian dari jurnal ini adalah mengetahui persepsi orang-orang rantau dari Padang Pariaman mengenai uang *japuik*, apakah para perantau tersebut mempunyai persepsi yang berbetuk positif ataupun negatif mengenai *uang japuik* di Bandar Lampung. Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh dari 92 responden maka diperoleh responden yang termasuk dalam kategori rendah persepsinya mengenai *uang japuik* sebanyak 7 responden atau 8%.

---

<sup>108</sup> Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan sumber penemuan Hukum Islam*, ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015

Responden ini mempunyai persepsi negatif mengenai *uang japuik*. Sebanyak 85 responden atau 92% responden termasuk dalam kategori tinggi dalam mempersepsikan *uang japuik*. Responden ini mempunyai persepsi positif mengenai *uang japuik*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah persepsi para perantau asal Kabupaten Padang Pariaman mengenai tradisi pemberian *uang japuik* dalam adat perawinan Padang Pariaman di kota Bandar Lampung, termasuk persepsi positif karena sebagian besar responden termasuk dalam kategori tinggi dalam mempersepsikan *uang japuik*.<sup>109</sup>

2. Roni Zuli Putra Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016 telah menulis skripsi dengan judul “Tradisi Uang *Japuik* dan Status Sosial Laki-laki”. Fokus penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah status sosial laki-laki menjadi tolak ukur besarnya uang jemputan yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah status sosial sangat menentukan terhadap besarnya *uang japuik* yang diberikan pihak perempuan kepada laki-laki yang akan menjadi pendamping hidupnya nanti. Semakin tinggi status sosial seorang laki-laki Pariaman semakin besar pula *uang japuik* yang akan diterima oleh laki-laki tersebut. Namun status sosial tidak semata dilatar belakangi oleh pekerjaan laki-laki tersebut. Hal lain yang masih menjadi pertimbangan yaitu latar belakang dari keluarga

---

<sup>109</sup> Ririanty Yunita, “Uang *Japuik* dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung”. *Jurnal Penelitian Kebudayaan*, 2012, h 15

tersebut seperti kedudukan laki-laki tersebut dalam adat misalnya bergelar *Sidi, Bagindo dan Sutan*. Di rantau Kutabumi secara garis besar laki-laki Pariaman berprofesi sebagai pedagang atau sudah membuka usaha sendiri kisaran *uang japuik* yang akan diterimanya berkisar 5-10 Juta (karyawan dan pedang kaki lima) 10-15 Juta (sudah punya usaha/bengkel sepatu (bos) sendiri). Kemudian jika laki-laki tersebut berprofesi sebagai PNS, Dokter, TNI dan Polisi *uang japuik* yang akan di terimanya antara 15- 50 Juta. Standarisasi *uang japuik* ini sesungguhnya tidak diatur dalam adat, sifatnya kondisional dan kesepakatan antara kedua pihak. Namun secara formalitas harus dilaksanakan sebagai tanda penghormatan kepada *ninik mamak*. *Uang japuik* tidak hanya sebuah bentuk penghargaan pihak perempuan terhadap laki-laki akan tetapi juga mengangkat derajat dan martabat pihak perempuan di tengah-tengah masyarakat perempuan terhadap laki-laki akan tetapi juga mengangkat derajat dan martabat pihak perempuan di tengah-tengah masyarakat.<sup>110</sup>

3. Zike Marta, Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dharma Andalas, Sumatera Barat tahun 2020 dengan Judul Jurnal “Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan *Bajapuik* pada masyarakat sungai garingging Kabupaten Padang Pariaman”. Fokus penelitian ini adalah persepsi dan makna yang dipahami masyarakat sungai garingging Kabupaten Padang Pariaman tentang tradisi bajapuik dalam adat perkawinan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan

---

<sup>110</sup> Roni Zuli Putra, “Tradisi Uang *Japuik* dan Status Sosial Laki-laki” (Skripsi Program Sarjana Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), h 59

adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah nampak bahwa tradisi bajapuik sangat bermakna bagi masyarakat sungai garingging Kabupaten Padang Pariaman, karena tradisi ini mengandung tiga nilai, yaitu pertama nilai sosial, nilai untuk menghargai pihak dari calon mempelai laki-laki karena pihak laki-laki akan menjadi pendatang di keluarga calon mempelai perempuan; kedua nilai budaya, yaitu tradisi yang unik, yang hanya ada di daerah Pariaman khususnya di sungai garingging Kabupaten Padang Pariaman; ketiga nilai agama yaitu sebagai penyempurnaan adat.<sup>111</sup>

Berbagai penelitian yang berkaitan dengan uang jemputan telah dipaparkan, perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah

1. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan uang jemputan yang berada di perantauan Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian sebelumnya yang berada di Kota Bandar Lampung membahas mengenai pendapat masyarakat Padang Pariaman mengenai uang jemputan.
2. Penelitian ini tidak membahas mengenai besarnya uang jemputan berdasarkan status sosial dan berbeda objek penelitian.
3. Penelitian ini tidak terfokus membahas mengenai makna uang jemputan di dalam masyarakat adat Padang Pariaman dan berbeda objek penelitian.

---

<sup>111</sup> Zike Marta, "Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan *Bajapuik* pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman". *Jurnal Biokultur*, Vol. 9, No. 1, 2020, h. 20-40

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abd Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta : Kencana , 2010

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* Jakarta: Amzah, 2010

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003

Al-Zarqa, Musthafa Ahmad, *Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968

Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang,,* Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya, 2001.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang*, Jakarta : Kencana Pramedia Group

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang*, Jakarta : Kencana Pramedia Group. 2006

-----, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.1, Jakarta: Prenada Media, 2003

Armaidi Tanjung, *Kehidupan benagari di Kota Pariaman*, Padang : Bappeda Kota Pustaka Artaz 2012

Azwar, Welhendri. *Matrilokal dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*, Yogyakarta : Galang Press, 2001

Badri Tamam, *Selayang Kota Bandar Lampung*, Bandar Lampung : Restu Utama, 2018

Bagindo Ammaidi Tanjung, *Kehidupan benagari di Kota Pariaman*, Padang : Bappeda Kota Pustaka Artaz 2012

- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2017
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Bulughul Maram , *Min Ahyati Ahkam* , Indonesia : Pustaka Islam
- Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007
- Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007
- Dep. Dikbud, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1994, cet. Ke-3, edisi ke-2
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Fauza Farid, "Analisis Hukum islam Tentang Tanggung Jawab Mamak Terhadap Prosesi Perkawinan Kemeneakan Menurut Adat Pariaman", Skripsi Program Sarjana Ilmu Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2016
- Fiony Sukmasari dan Amir M.S, *Traditional Wedding of Minangkabau*, Jakarta: Citra Harta Prima, 2009
- Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh : Yayasan PeNa, 2010
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Hilman Hadi Kesuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari, Achmad Sunarto, *et.al*, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993
- Imam Bukhori, *Shahih Adabul Mufrad* , terjemahan Al Adabul Mufrod, Bekasi : Pustaka As-Shahihah

- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2*, Jakarta: Pustaka Azzam
- Izzudin ibn , Abd Salam, *Qawa'd al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Julius, Malako Nan Putiah, *Membangkit Batang Tarandam dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, Jakarta: Citra Umbara, 2007
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosia, Cetakan VII*, Bandung : Mandar Maju, 1996
- Kitab Bulughul Maram , *Min Ahyati Ahkam* , Indonesia : Pustaka Islam
- Kompilasi Hukum Islam Tentang Buku I Hukum Perkawinan, Instruksi Presiden No 1 Tahun 1999
- Kutbuddin Aibak, "*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*". Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94. Kutbuddin Aibak, "*Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*", dalam Ahkam: Jurnal Hukum Islam, volume 5 No. 2 November 2017
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- M. A. Tihami, *Fikih Munakahat, Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Press 2009
- Maihasni, "*Eksistensi Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat*",
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada media Group, 2016
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*, Yokyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005
- Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz VII, Beirut: Dar Al Kutub, Al-Ilmiyah



- Muhammad Bushar, *Azaz-azaz Hukum Adat Suatu Pengantar*, Paradya Paramita, 2003
- Muhammad Saleh Al-Usmani, *Pernikahan Islami: Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: Risalah Gusti, 1991
- Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Am*, Beirut: Dar al-Fikr, 1967-1968
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif Data Sekunder*, Depok : PT. Raja Grafindo, 2014
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017
- Navis, Ali Akbar, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Pers. 1984
- Nina Nurdiana, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan". *Comtech* Vol 5 No 2 Desember 2014
- Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung : PT. Alumni Bandung, 2002
- Quraishy Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Cet. VIII Jakarta: Lentera Hati, 2011
- Ririanty Yunita, "Uang *Japuik* dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung". *Jurnal Penelitian Kebudayaan*, 2012
- Roni Zuli Putra, "Tradisi Uang *Japuik* dan Status Sosial Laki-laki" Skripsi Program Sarjana Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Saleh Al-Fauzan, *FiQih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Salmon Praiji Pratama, "*Problematika Penerapan Metode Field Research untuk penelitian arsitektur vernacular di Indoensia*"
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Juz VI*, Bandung: Al ma'arif, 1980
- Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan UU perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 2007
- Subhi Mahmarshani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Kasysyaf, 1961

Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta : Rajawali Press

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008

Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Welhendri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, Yogyakarta : Galang Press, 2001

Zainal Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazhair ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man*, Mesir: Mu'assasah al-Halabi wa Syurakah, 1968

Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan, 2018

### **Jurnal**

Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah", *Jurnal Rausyan Fikr*. Vol. 14 No.(1 Maret 2018) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997

Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan sumber penemuan Hukum Islam*, ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015

Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* Vol. 14 No. 2 – 2016

Zike Marta, "Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan *Bajapuik* pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman". *Jurnal Biokultur*, Vol. 9, No. 1, 2020

Ririanty Yunita. "Uang *Japuik* dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung", Universitas Lampung, Lampung, 2012

Zike Marta, Jurnal "Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan *Bajapuik* pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman", Universitas Dharma Andalas, Sumatera Barat, 2020

### **Skripsi**

Roni Zuli Putra , "Tradisi Uang *Japuik* dan Status Sosial Laki-laki", Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta 2016

### **Wawancara**

A.Gani, wawancara dengan yang menjalankan adat, Bandar Lampung, 15 November 2020

Alparizal, wawancara dengan yang menjalankan adat, Bandar Lampung, 12 November 2020

Andri Majodirajo, wawancara dengan datuk PKDP, Bandar Lampung 26 September 2020

Ir. Sawadichon, wawancara dengan tokoh adat, Bandar Lampung 26 September 2020

Kamal Abdul Nasyir, wawancara dengan yang menjalankan adat, Bandar Lampung, 10 November 2020

Nurhayati, wawancara dengan Bundo Kandung Kota, Bandar Lampung 28 Agustus 2020

Ramandung Piliang, wawancara dengan DPW PKDP Provinsi Lampung, Bandar Lampung 07 Januari 2021

Zalmiayanti, wawancara dengan yang menjalankan adat, Bandar Lampung, 17 Juli 2020

### **Sumber *On-Line***

Anjuran menikah (On-line), tersedia di: <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html> (18 Januari 2021)

Badan Pusat Statistika Kota Bandar Lampung, (On-Line) tersedia di : <https://bandarlampungkota.bps.go.id/> (11 Januari 2021)

Portal Kota Bandar Lampung (On-Line) tersedia di: <http://bandarlampungkota.go.id/> (04 November 2020)

Sejarah Lampung (On-Line) tersedia di : <https://www.lampungprov.go.id/pages/sejarah-lampung> (11 Januari 2021)

**LAMPIRAN 1****SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kamal Abdul Nasir  
Usia/Pekerjaan : 39 tahun / Wiraswasta  
Alamat : Jl. Singa mangaraja / Gedung Aer

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **TRADISI UANG JEMPUTAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT PADANG PARIAMAN STUDI KASUS DI BANDAR LAMPUNG**

Oleh saudara

Nama : Teresa  
NPM : 1721010067  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Universitas : UIN Raden Intan Lampung

Demikian surat wawancara ini saya buat dapat digunakan sebagai mana mestinya

Bandar Lampung, 10 November 2020

Pihak yang diwawancarai



## LAMPIRAN 2

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kamal Abdul Nasir  
Usia/Pekerjaan : 39 tahun / Wiraswasta  
Alamat : Jl. Singa mangaraja / Gedong Aer

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk penelitian guna menyusun skripsi dengan judul TRADISI UANG JEMPUTAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT PADANG PARIAMAN STUDI KASUS DI BANDAR LAMPUNG

Oleh saudara

Nama : Teresa  
NPM : 1721010067  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Universitas : UIN Raden Intan Lampung

Demikian surat wawancara ini saya buat dapat digunakan sebagai mana mestinya

Bandar Lampung, 10 November 2020

Pihak yang diwawancarai



**LAMPIRAN 3****SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zalmiyati  
Usia Pekerjaan : 43 thn / Guru  
Alamat : Jl Turi Bluk U Perum Kamling No 3

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk penelitian guna menyusun skripsi dengan judul TRADISI UANG JEMPUTAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT PADANG PARIAMAN STUDI KASUS DI BANDAR LAMPUNG

Oleh saudara

Nama : Teresa  
NPM : 1721010067  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Universitas : UIN Raden Intan Lampung

Demikian surat wawancara ini saya buat dapat digunakan sebagai mana mestinya

Bandar Lampung, 03 Agustus 2020

Pihak yang diwawancarai

**LAMPIRAN 4**

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alpa Rizal  
Usia Pekerjaan : 42 / PNS  
Alamat : Jl. Batu Dibalau Perumahan 11 No 29.


Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk penelitian guna menyusun skripsi dengan judul TRADISI UANG JEMPUTAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT PADANG PARIAMAN STUDI KASUS DI BANDAR LAMPUNG

Oleh saudara

Nama : Teresa  
NPM : 1721010067  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Universitas : UIN Raden Intan Lampung

Demikian surat wawancara ini saya buat dapat digunakan sebagai mana mestinya

Bandar Lampung, 12 November 2020  
Pihak yang diwawancarai



**LAMPIRAN 5****SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Gani  
Usia Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl Perintis Kemerdekaan No 25

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk penelitian guna menyusun skripsi dengan judul TRADISI UANG JEMPUTAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT PADANG PARIAMAN STUDI KASUS DI BANDAR LAMPUNG

Oleh saudara

Nama : Teresa  
NPM : 1721010067  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Universitas : UIN Raden Intan Lampung

Demikian surat wawancara ini saya buat dapat digunakan sebagai mana mestinya

Bandar Lampung, 15 November 2020

Pihak yang diwawancarai





**LAMPIRAN 6**

**LAMPIRAN 7**